

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2003 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI
KABUPATEN BERAU**

Febri Ersaputri¹

**eJournal Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, 2016**

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : febriersaputri@gmail.com

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau

Pengarang : Febri Ersaputri

NIM : 1202015143

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Hj.Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 4	
Nomor : 4	
Tahun : 2016	
Halaman : 4911-4923 (Ganjil)	<u>Dr. Enos Paselle, M.AP</u> NIP. 19740524 200501 1 002

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN BERAU

Febri Ersaputri¹

Abstrak

Febri Ersaputri, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau", dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Prof.Dr.Hj.Aji Ratna Kusuma,M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr.Enos Pabelle, M.Ap, selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau dan mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penghambat implemementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen BPPT Kabupaten Berau. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat BPPT yang belum sepenuhnya menjalankan dari isi perda tersebut, bahkan nyaris tidak terlaksanakan. Faktor penghambat implementasi perda adalah tidak ada sosialisasi atau penyampaian informasi kepada para pemilik usaha sarang burung walet, belum tegasnya sikap aparaturnya kepada pemilik usaha sarang burung walet, tidak ada petunjuk pelaksana dalam izin usaha sarang burung walet, tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, partisipasi yang kurang dari pemilik usaha sarang burung walet, serta kurangnya dukungan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Perizinan Sarang Burung Walet

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : febriersaputri@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konteks tersebut dapat dijumpai pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemberhentian dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Jika dilihat dari kewenangan yang lebih diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah pastilah membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang ada di daerah seperti berasal dari perpajakan, retribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lain yang sah.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin keberadaan populasinya di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha karena masalah perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2011. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 telah diterbitkan, tetapi kenyataannya dalam prakteknya peraturan daerah ini masih belum terlaksana dengan baik, apa yang ada di dalam peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau dilingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah yaitu bangunan walet sudah ada sebelum perda nomor 4 tahun 2003 dibuat, banyaknya bangunan yang beralih fungsi, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan BPPT dan tidak tegasnya sikap pelaksana kepada pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau ?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Administrasi, utamanya yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan:
 - a. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Federick sebagaimana (dikutip Agustino 2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group)

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang di definisikan oleh Dye (dalam Agustino, 2012:7) yang mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau dikerjakan.

Model-Model Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Agustino 2008:131) model formulasi kebijakan, sebagai berikut :

1. Model sistem,
2. Model elite,
3. Model institusional,
4. Model kelompok,
5. Model proses,
6. Model rasional,
7. Model incremental,
8. Model pilihan publik,
9. Model teori permainan (*games theory*).

Proses Kebijakan Publik

William Dunn (dalam Subarsono 2013:8) menggambarkan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah,
2. *Forecasting* (peramalan),
3. Rekomendasi Kebijakan,
4. Monitoring Kebijakan,
5. Evaluasi Kebijakan.

Tahapan Kebijakan Publik

Berikut adalah tahapan kebijakan publik yang dikemukakan Winarno (2012:122) :

1. Tahap pertama : perumusan masalah (*defining problem*)
2. Tahap kedua : agenda kebijakan
3. Tahap ketiga : pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.
4. Tahap keempat : tahap penetapan kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Tachjan (dalam Tahir 2014:53) mengemukakan implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Pengertian Implementasi

Jones (dalam Widodo 2010:86) mengartikan implementasi sebagai *getting the job done "and" doing it*. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti ini tidak berarti implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya

beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Pandangan Edward III (dalam Subarsono 2013 : 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,
3. Disposisi dan
4. Struktur birokrasi.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka menertibkan perizinan pada pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau.

Perizinan

Bagir Manan (dalam Ridwan HR 2007:207) menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.

Burung Walet

Burung walet merupakan salah satu spesies unggas yang hidup di alam bebas. Pada awalnya, burung ini banyak menghuni gua-gua alam yang terdapat di pegunungan atau bukit-bukit di tepi laut. Karakteristik gua yang lembab, bersuhu dingin, dan memiliki pencahayaan yang terbatas memang sangat disukai walet.

Definisi Konsepsional

Dari definisi tersebut yang berhubungan dengan penelitian, maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah kegiatan melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau ditinjau melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna memberikan izin usaha dan kelola bagi pengusaha sarang burung walet.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap dan memperoleh data yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Berau.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) BPPT Kabupaten Berau dan yang menjadi *informan* lain yaitu Staf Pelaksana Bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemilik usaha sarang burung walet.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada 3 (tiga) proses kegiatan yang dilakukan peneliti seperti yang dikemukakan oleh Kaelan (dalam Moleong 2005:182), yaitu:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian *Getting In* yaitu menganggap bahwa semua objek sama kedudukannya sehingga ia tidak akan pandang bulu dalam mengumpulkan data, baik dari tingkatan atas, bawah, kaya, maupun miskin.
2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian *Getting Along* yaitu melakukan hubungan pribadi dan membangun kepercayaan pada subyek penelitian.
3. Mengumpulkan Data *Logging the Data* yaitu proses pengumpulan data meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a) Wawancara Mendalam *Indepth Interview*
 - b) Dokumentasi
 - c) Observasi

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion*

Drawing/Verifications.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Berau

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Berau adalah unsur pelaksanaan administrasi publik di bidang perijinan yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, BPPT Kabupaten Berau mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Berau sebagai Kabupaten tujuan investasi.

Hasil Penelitian

Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi. Oleh karena itu faktor komunikasi adalah hal yang terpenting dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,

Sumberdaya

Sumber daya adalah pelaksana yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya juga meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi kewenangan. Sumberdaya adalah faktor kedua sebagai ukuran keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Disposisi

Disposisi adalah kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau untuk mengetahui sikap pelaksana.

Struktur Birokrasi

Di dalam implementasi kebijakan tentunya terdapat banyak pihak didalamnya dimana semua pihak saling bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berjalan dengan baik maka perlu adanya manajemen yang baik pula. Dalam struktur birokrasi haruslah ada hubungan-hubungan yang baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jika hubungan birokrasi baik maka dalam melaksanakan implementasi kebijakan juga akan berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau

Faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau yaitu :

1. Tidak Adanya Komunikasi

Jika menganalisis mengenai komunikasi dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, maka dapat dikatakan komunikasi yang dijalin BPPT kepada pemilik usaha sarang burung walet tidak ada. Seperti banyak pemilik usaha sarang burung walet yang membenarkan tidak adanya pemberitahuan mengenai adanya perda izin kelola dan usaha sarang burung walet di Kabupaten Berau.

2. Tidak adanya sumberdaya finansial.

Sumberdaya finansial termasuk hal yang terpenting dalam keberhasilan implementasi namun belum adanya anggaran untuk pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet juga menjadi penghambat.

3. Disposisi

Sikap dan tindakan juga merupakan hal terpenting dalam keberhasilan suatu implementasi, namun sikap pelaksana kepada pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dirasa tidak tegas.

Pembahasan

Komunikasi

Tentu saja ini sesuai dengan yang dikatakan oleh George C Edward III (dalam Subarsono 2013:90) yang mengatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam hal ini komunikasi menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Sumberdaya

Sumberdaya adalah salah satu fokus dalam penelitian ini yang menjadi indikator untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet belum dikatakan

terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari anggaran yang belum ada untuk melaksanakan implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, namun untuk fasilitas sudah cukup memadai dalam melaksanakan izin kelola dan usaha sarang burung walet dan kemudian aparat yang bekerja juga sudah mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya dan melihat dari pendidikan para pegawai di BPPT juga sudah bisa dikatakan cukup berkompeten.

Disposisi

Disposisi yang dimaksudkan Edward III (dalam Subarsono 2013:90) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi

Dari hasil pengamatan penulis struktur birokrasi untuk perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di BPPT sudah berjalan cukup baik, baik dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet. Partisipasi dari masyarakat pemilik sarang burung walet juga sangat diperlukan karena keterbukaan dan transparansi di dalam pelaksanaan peraturan daerah dapat memperlancar jelasnya jalan perizinan, sehingga pelaksanaan peraturan daerah tentang perizinan kelola dan usaha yang diharapkan dapat terwujud.

Edward III (dalam Subarsono 2013:90) bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.

Faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau yaitu :

Dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu tidak adanya komunikasi antara BPPT kepada para pemilik usaha sarang burung walet

mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur tentang izin kelola dan usaha sarang burung walet dan sikap pelaksana yang kurang tegas yang terlihat dengan masih berupa wacana dan belum berupa tindakan yang nyata. Kemudian belum adanya anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet:
 - a. Faktor Komunikasi
Penyampaian informasi mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur izin kelola dan usaha sarang burung walet kepada para pemilik usaha sarang burung walet belum dilaksanakan oleh BPPT. Sehingga rata-rata pemilik usaha tidak memiliki izin kelola dan usaha, karena ketidaktahuan informasi mereka mengenai sarang burung walet yang harus memiliki izin.
 - b. Faktor Sumberdaya
Mengenai sumber daya dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan belum bisa dikatakan baik. Para pelaksana telah mengetahui adanya peraturan daerah ini. Mengenai fasilitas juga tidak ada kendala, fasilitas dirasa sudah cukup memadai. Namun belum adanya anggaran untuk pelaksanaan izin kelola dan usaha sarang burung walet membuat perda ini tidak terlaksana.
 - c. Faktor Disposisi
Dapat dikatakan bahwa disposisi pada implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan kurang optimal. Dikarenakan tidak tegasnya sikap pelaksana pada pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin kelola dan usaha sarang burung walet.
 - d. Struktur Birokrasi.
Struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet Kabupaten Berau sudah terlaksana dengan baik. Ini dibuktikan dengan proses yang tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit pemilik usaha sarang burung walet yang ingin mengurus izin kelola dan usaha sarang burung walet dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau yaitu:

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet antara lain tidak terjalinnya komunikasi antara pihak BPPT dengan pemilik usaha sarang burung walet, kemudian kurang tegasnya sikap pelaksana kepada pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dan belum adanya anggaran untuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Komunikasi yang tidak terlaksanakan membuat pemilik usaha sarang burung walet tidak mengetahui tentang peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan. Sebaiknya BPPT mengadakan sosialisasi, sebagai bentuk komunikasi kepada pemilik usaha sarang burung walet bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan sarang burung walet, sehingga tidak ada lagi bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki izin kelola dan usaha sarang burung walet.
2. Seharusnya ada koordinasi antara pihak BPPT dengan pemerintah daerah mengenai anggaran yang belum ada untuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
3. Untuk sikap pelaksana dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet dirasa tidak tegas. Ada baiknya aparaturnya menindak tegas pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin, agar pemilik usaha sarang burung walet bisa mematuhi isi dari peraturan daerah ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- A.G. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indiahono. Dwiyanto. 2008. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media
- Islamy.M.Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juniarso, Ridwan dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi*

- Kismartini, M. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman offset
- Koryati, Nyimas Dwi. 2004 *Kebijakan dan Manajemen dan Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
- Kriyantono, Rachmat.2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
- Lubis, M.Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV: Mandar Maju
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Salekat, Nasir. 2009. *Membangun Rumah Walet Hemat Biaya*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Singarimbun. 2006. *Konsep Dalam Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Utama, Arya, I Made. 2012. *Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- _____. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

_____. 2012. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Berau No.34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kabupaten Berau

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kabupaten Berau.

Sumber Internet:

Eka, Rieza. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang* (online). Tersedia: <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id> (17 Oktober 2015)

Hendriyani. (2014). *Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008* (online). Tersedia: <http://repository.uin-suska.ac.id>. (2 Oktober 2015).

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (online). Tersedia: <http://ojs.unud.ac.id>. (12 Oktober 2015)